

PREVIOUS ISSUE

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum

Volume 1, issue 1 June 2021

1. Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Tujuan Pemidanaan
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak
4. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang
5. Tahun 2018-2023 Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda
6. Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia

Volume 1, issue 2 Desember 2021

1. Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan
2. Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Menyelesaikan Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Putusan Nomor :5/G/2020/Ptun.Srg)
4. Kewenangan Pengawasan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Kabupaten Bekasi

5. Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
6. Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit Tni Yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii – 08 Jakarta)
7. Standarisasi Penanganan Kesehatan Pencegahan Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Volume 2, issue 1 June 2022

1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak
3. Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss
4. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)
5. Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara Tangerang)
6. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang

- Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)
7. Pemberian Informed Consent Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan
 8. Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu
 9. Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
 10. Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945

Volume 2, issue 2 Desember 2022

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)
3. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Efektivitas Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Atas Kematian Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur
5. Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan
6. Dialektika Norma Islam Dan Norma Hukum Positif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Alquran Di Provinsi Gorontalo
7. Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Untuk Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)
8. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten
9. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten
10. Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer Di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
11. Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
12. Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)
13. Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai

Volume 3, issue 1, Juni 2023

1. Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/PNMad)
2. Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara
3. Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)
4. Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional
5. Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Etikad Baik dalam Transaksi E-commerce
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)
7. Analisa Hukum Peran Bappebti Terhadap Affiliator Dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading

Volume 3, issue 2 Desember 2023

1. Legal and Social Impact of the Community on the Suspension of Waqf Land Executions: A Study of Balung Tombs

2. Airspace Delegation: Preserving Indonesia Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment
3. Court System Transformation; Maximizing Electronic Courts through the Implementation of Swift, Simple, and Cost Effective Principles
4. Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment
5. Sweet Poison: Syrup Drugs and the Imperative of Consumer Protection against Acute Renal Failure
6. Governance Unveiled: Jeremy Bentham's Legal Philosophy in Government Policies through the Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program for Village Funds
7. Juridical Insight: Resolving Interim Village Head Election Disputes in Sumbawa Regency
8. Optimizing Land Use Laws: A Comprehensive Revision of Law No. 56 of 1960 on Agricultural Land Area
9. Exploring Legal Dimensions: The Role of Generation Z and Millennials in Online Lending through the Lens of Islamic Law
10. Bridging Legal Frontiers: Analyzing Interfaith Marriages between Indonesia and Thailand - An In-Depth Study of Marriage Laws
11. Constitutional Concept of the Village Chief Office Term Extension and It's Legal Implications

Volume 4, issue 1 J u n i 2024

1. The Role of Universities in Protecting Intellectual Property of SMEs
2. Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Greboan Tradition in the Osing Banyuwangi Community
3. Implementation of Restorative Justice in Discontinuing Prosecution of Assault Criminal Acts (A Case Study at the Public Prosecutor's Office of Garut)
4. Termination of Employment of PT. Lotte Mart Indonesia
5. The Effective Role of BPSK in Resolving Consumer Disputes in Accordance with UUPK: Legal and Theoretical Perspectives
6. Validity of Surrendering Cessies Without Debtor Notification in Sharia Banking Bankruptcy Cases
7. Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates
8. Understanding the Legal Implications of Regulatory Transfers: A Post-Decision Analysis of MK No. 27/PUU-IX/2011 under the Omnibus Law Framework
9. Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status In Indonesian Positive Law
10. The Legality of Provoked Abortion Due to Rape: A Human Rights Perspective

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the sultan.jurisprudence@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.

The Editors of Sultan Jurisprudence would like to thank all of our peer reviewers, both external and editorial board members, who have contributed to the journal in Vol. 4 No. 1 (2024) and whose valuable support is fundamental to the success of the journal.

Editorial Team,
Sultan Jurisprudence Jurnal Riset Ilmu Hukum
e-mail: sultanjurisprudence@untirta.ac.id

Available Online via: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index>



Volume IV, Issue 2 (2024)

